

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI BANTEN

Agung Basuki

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten

abasuki1963@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems of educational development, the achievements of educational development, and formulate a strategy for education development in Banten Province after obtaining an autonomous region independently in 2000. The research was conducted through a descriptive qualitative method by conducting a series of interviews with a number of participants and reviewing documents and literature relevant to research data. Theories and concepts of development, educational development, regional autonomy are the basis for analyzing research results. The results showed that there were a number of problems related to the development of education in Banten Province, namely: limited educational infrastructure such as the number of buildings, educational facilities, limited facilities and infrastructure. Apart from that, education development is also unequal, people's access to education is not optimal, good schools are only located in city centers, and the capacities and competencies of teachers are still diverse, not yet fully high quality according to standards. In addition, the coordination between the provincial government and district/city governments has not been going well. The vision and mission of education development in Banten Province has not yet fulfilled the expectations at both the provincial and district/city government levels.

Keywords: *education development, regional autonomy, Banten Province.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pembangunan pendidikan, capaian pembangunan pendidikan, dan menyusun strategi pembangunan pendidikan di Provinsi Banten setelah memperoleh daerah otonom secara mandiri pada tahun 2000. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan melakukan serangkaian wawancara kepada sejumlah partisipan dan telaah dokumen serta kepustakaan yang relevan dengan data penelitian. Teori dan konsep pembangunan, pembangunan pendidikan, otonomi daerah berkaitan dengan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten, yaitu: keterbatasan sarana prasarana pendidikan seperti jumlah gedung, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana yang terbatas. Selain itu pembangunan pendidikan juga tidak merata, akses masyarakat terhadap pendidikan belum optimal, sekolah yang bagus hanya ada di pusat-pusat kota, dan kapasitas serta kompetensi guru masih beragam belum sepenuhnya berkualitas tinggi sesuai standar. Di samping itu koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga belum berjalan baik. Visi misi pembangunan pendidikan di Provinsi Banten belum berjalan sesuai dengan harapan baik pada level pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kata Kunci: *pembangunan pendidikan, otonomi daerah, Provinsi Banten.*

PENDAHULUAN

Provinsi Banten merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sejak 4 Oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten saat ini sudah berusia 20 tahun sejak memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Sudah dua dekade Provinsi Banten menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah.

Banyak capaian yang sudah diraih Provinsi Banten dari berbagai sektor pembangunan, pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.

Masalah pendidikan masih menjadi permasalahan di Banten. Bagaimana pemerintah, para pendidik, lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh anggota masyarakat sebagai *stakeholder* yang sangat berkepentingan dengan pendidikan harus menyikapi persoalan tersebut secara bersama-sama dalam rangka menghadapi globalisasi yang sudah masuk ke segala sudut kehidupan masyarakat. Pendidikan seharusnya dapat mewujudkan manusia yang merdeka, mandiri, toleran, kompeten dan tanggung jawab. Bagaimana kurikulum dan proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan agar dapat membantu proses pengembangan pribadi peserta didik sehingga mereka tidak kehilangan identitas dirinya di tengah-tengah masyarakat global.

Tantangan pendidikan berikutnya adalah berlakunya otonomi daerah. Bagaimana selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah dapat menyikapi berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah dan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apa implikasi bagi perkembangan pendidikan dan kebudayaan daerah, pendidikan lokal dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan, sistem pembangunan sektor pendidikan di daerah, kebijakan-kebijakan yang mesti meletakkan pembangunan sektor pendidikan sebagai skala prioritas utama serta bagaimana menghadapi kendala-kendala yang ada di daerah-daerah.

Beberapa masalah di atas wajib dijawab dan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pembangunan pendidikan di Banten harus diakui masih menyisakan banyak masalah. Selain keterbatasan fasilitas pendidikan yang belum merata baik kualitas dan kuantitasnya menyangkut ketersediaan gedung dan peralatan dan sarana prasarana lainnya, akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan 12 tahun wajib belajar juga masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Provinsi Banten harus bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan pendidikan guna mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Banten menyadari hal ini. Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan suatu daerah untuk meningkatkan kualitas manusia dalam beradaptasi dan berkompetisi, berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas pendidikan di Banten akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kualitas pembangunan di Banten.

Dalam rencana pembangunan yang telah ditetapkan, Provinsi Banten menempatkan kebijakan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten dalam visi-misinya menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai misi ke-3, yaitu: “Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas”. Sementara itu dalam RPJMD Provinsi Banten disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing. Selanjutnya untuk meningkatkan akses pendidikan telah ditetapkan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).

Kondisi pembangunan pendidikan Provinsi Banten sampai dengan tahun 2019 secara sederhana dapat dilihat dari aksesibilitas pembangunan pendidikan yang diterima masyarakat. Aksesibilitas dapat digambarkan dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, dapat dilihat dari indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). Kedua hal ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam memastikan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun, RLS menunjukkan rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang telah dirasakan atau diselesaikan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas. Sementara itu, AHLS menunjukkan rata-rata harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. Baik RLS maupun HLS, keduanya merupakan komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan. IPM dibentuk atas tiga Dimensi dasar (1) Umur Panjang dan Hidup Sehat, (2) Pengetahuan, (3) Standar Hidup Layak.

Menurut Amin Rohani (Peneliti Spesialis Kebijakan Publik PATTIRO Banten), dalam lima tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi Banten naik 2 point dari 66.25 % (2014) menjadi 68.35% (2018). Kenaikannya sama dengan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat nasional yang juga naik 2 Point dari 70.31% (2014) menjadi 71.99% (2018) walaupun demikian jika tidak ada percepatan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Maka akan terus di bawah rata-rata nasional. Artinya masih ada 31.65% masyarakat Di Provinsi Banten yang belum bisa menikmati pendidikan. Dalam 5 tahun terakhir angka APM Provinsi Banten terus mengalami kenaikan dari 56.35% (2014) naik menjadi 58.72% (2018) tapi angkanya masih di bawah angka rata-rata nasional. Selain itu, peningkatan point terlihat tidak ada percepatan yang signifikan salah satunya di sebabkan penetapan target APM dalam RPJMD yang terlalu rendah. Kemudian Tahun 2018 APM Provinsi Banten pun tidak mampu menjangkau target RPJMD dari target 58.77% (2018) Banten hanya mampu mencapai 58.72% Artinya masih 42% siswa usia SMA yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Sementara untuk 4 tahun selanjutnya menurut Amin Rohani tidak lagi mencapai target. Target RPJMD; 69.87 (2014), 73.87 (2015), 77.87 (2016), 81.87 (2017), dan 72.90 (2018) sementara capaiannya; 72.94 (2014), 69.73 (2015), 71.13 (2016), 75.89 (2017), dan 71.70 (2018). Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) maupun Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Provinsi Banten memang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, RLS meningkat dari 8,19 tahun (2014) menjadi 8,62 tahun (2018). Sementara itu, HLS meningkat dari 12,31 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2016). Dengan kata lain, rata-rata penduduk di Provinsi Banten saat ini belum dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. Sedangkan di masa mendatang, diharapkan rata-rata penduduk di Provinsi Banten dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SMA.

Amin Rohani menambahkan, dengan menelusuri data lebih lanjut, RLS di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang ternyata merupakan yang terendah dan jauh di bawah RLS Provinsi Banten. RLS di tiga kabupaten tersebut, pada tahun 2018,

masing-masing ialah 6,72; 6,21; dan 7,18. Dengan kata lain, rata-rata penduduk di ketiga kabupaten tersebut baru dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan belum dapat menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun demikian, jika melihat HLS, di tahun-tahun ke depan dapat diharapkan akan terjadi perbaikan pencapaian. HLS Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang sudah di atas 12 tahun sedangkan HLS Kabupaten Lebak baru mencapai 11,93 tahun pada tahun 2018. Kabupaten Lebak merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Banten dengan HLS di bawah 12 tahun. (Amin Rohani, <https://satubanten.com/catatan-pembangunan-pendidikan-dibanten>).

Dari data-data tersebut, terlihat bahwa terdapat ketimpangan antar daerah di Provinsi Banten dalam aspek aksesibilitas terhadap pendidikan. Status sebagai daerah otonom setelah lepas dari Provinsi Jawa Barat dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun pendidikan dengan segala sistem pendukungnya mulai dari fasilitas dan sarana prasarana, guru, sistem pendidikan, dan lainnya. Pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Banten masih banyak untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Banten mulai dari jenjang yang paling dasar hingga tinggi. Memasuki usia dua puluh tahun pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan pendidikan tampaknya masih belum berjalan seperti yang diharapkan, padahal pendidikan merupakan elemen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Konsep (pengertian) pembangunan menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Barangkali tidak ada satupun disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang beragam seperti halnya dalam memberikan pengertian tentang perencanaan. Istilah pembangunan bisa diartikan berbeda oleh satu ahli dengan ahli yang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pengertian tentang pembangunan juga dikemukakan oleh Siagian (1994) yakni: Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara tradisional pembangunan mempunyai arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004). Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan *income percapita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroiti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003).

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga nilai inti (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000): Pertama; Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. Kedua; Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan

kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Ketiga; *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan.

Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan. (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ini yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people-centered development* atau *panting people first* (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003).

Pembangunan Pendidikan

Pembangunan di negara-negara berkembang dewasa ini termasuk negara Indonesia sedang menghadapi masa-masa yang berat karena harus menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Selain tantangan globalisasi yang identik dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK), industri 4.0, dan berlakunya otonomi daerah juga disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi yang

cukup berat. Dalam kondisi demikian maka pembangunan harus lebih memfokuskan diri pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat, tidaklah diperuntukkan untuk mencapai target-target pembangunan semata-mata, tetapi pembangunan itu disusun, direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia. Oleh karena itu manusia merupakan titik sentral dari pembangunan nasional kita. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia harus menjadi tujuan pembangunan dan arah dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian apabila pendidikan nasional merupakan proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia, maka tujuan pendidikan nasional Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah membangun manusia-manusia berkualitas yang unggul dalam persaingan global dan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah di abad millennium ini.

Pembangunan pendidikan haruslah dipandang sebagai suatu sistem yang utuh dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sistem pendidikan terdiri dari sub sistem-sub sistem kurikulum, sarana prasarana, aturan dan prosedur pengelolaan lembaga penyelenggara pendidikan, prosedur dan proses pembelajaran, standar peserta didik, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar kelulusan yang harus saling bersinergi menjadi sistem yang efektif dan efisien. Suatu sistem hanya efektif dan efisien apabila dikelola secara tepat. Lembaga-lembaga pendidikan nasional sebagai sistem haruslah dikelola secara profesional.

Pembangunan pendidikan adalah proses perombakan struktural sub sistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan subsistem operasional yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektifitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan haruslah menjadi perhatian yang besar dalam pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia.

UNESCO (United Nation on Educational, Social, and Cultural Organization), Badan Dunia yang mengurus pendidikan mencanangkan program *EFA (Education for All)*. *EFA (Education for All)* adalah pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa kecuali baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Di negara kita, hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 31. Hakekat *Education for All* pada intinya adalah mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Program pembelajaran untuk semua merupakan wujud pembelajaran yang menyangkut semua usia entah orang dewasa, orang tua maupun anak-anak yang bertujuan agar lebih mengerti tentang sesuatu. Dalam upaya mewujudkan *Education for All (EFA)*, masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain:

- Di seluruh dunia termasuk Indonesia, lebih dari 100 juta anak-anak, termasuk setidaknya 60 juta anak-anak, tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar.

- Di seluruh dunia termasuk Indonesia, lebih dari 960 juta orang dewasa, dua pertiga di antaranya adalah perempuan yang buta huruf, dan buta huruf adalah masalah yang signifikan di semua negara, termasuk di negara industri dan berkembang.
- Di seluruh dunia termasuk Indonesia, lebih dari sepertiga orang dewasa di dunia tidak mendapatkan pengetahuan tertulis, keterampilan, dan teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka dalam beradaptasi menghadapi perubahan sosial dan budaya.
- Di seluruh dunia termasuk Indonesia, lebih dari 100 juta anak-anak dan orang dewasa yang tak terhitung, gagal untuk menyelesaikan program pendidikan dasar.
- Di seluruh dunia termasuk Indonesia, jutaan orang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendidikan, namun mereka tidak memperoleh pengetahuan dan keterampilan esensial.

Selain permasalahan di atas, masih banyak masalah-masalah lain yang menghambat upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar. Masalah terkait kemunduran ekonomi, pertumbuhan penduduk yang cepat, kesenjangan ekonomi antar bangsa, adanya konflik dan perang saudara serta berbagai bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan telah menyebabkan kemunduran besar dalam pendidikan dasar pada 1980-an di banyak negara sedang berkembang.

Menghadapi beberapa kendala tersebut di atas, maka diperlukan komitmen untuk mewujudkan *Education for All (EFA)*, yakni:

- Memperluas dan meningkatkan perawatan anak usia dini yang komprehensif dalam pendidikan.
- Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di dunia tanpa terkecuali memiliki akses lengkap dan bebas ke wajib pendidikan dasar yang berkualitas baik.
- Memastikan bahwa kebutuhan belajar semua pemuda dan dewasa dipenuhi melalui akses yang adil untuk pembelajaran yang tepat dan program ketrampilan hidup.
- Mencapai 50% peningkatan dalam keaksaraan orang dewasa pada tahun 2015, khususnya bagi perempuan, dan akses ke pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa secara adil.
- Menghilangkan perbedaan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan sampai dengan tahun 2015, dengan fokus pada perempuan bahwa mereka dipastikan mendapat akses penuh dan sama ke dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
- Meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulan semua sehingga diakui dan diukur hasil pembelajaran yang dicapai oleh semua, khususnya dalam keaksaraan, berhitung dan kecakapan hidup yang esensial.

Untuk mencapai komitmen *Education for All (EFA)* seperti yang diharapkan maka diperlukan upaya-upaya konseptual dan kongkrit antara lain sebagai berikut:

- Menyediakan dan menambah dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyekolahkan anak-anak di dunia.

- Meningkatkan kualitas pendidikan dengan pelatihan dan perekrutan guru profesional sampai dengan tahun 2015, sehingga semua anak memiliki kesempatan untuk belajar di kelas.
- Mendorong pemerintah untuk mendefinisikan dan mengukur standar minimal pembelajaran, sebagai tonggak utama terhadap peningkatan hasil pembelajaran dan strategi yang lebih luas untuk menjamin kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga peserta didik terus mengembangkan keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan kontribusi untuk ekonomi produktif.
- Menjangkau semua anak dengan mengembangkan strategi-strategi baru untuk mencapai kondisi yang sulit dijangkau anak-anak dalam konflik, di daerah terpencil, dan dari kelompok-kelompok didiskriminasi.
- Memperluas kesempatan pendidikan pada semua tingkatan, termasuk perawatan anak usia dini dan pengembangan, pendidikan menengah dan penyediaan kesempatan kedua belajar bagi mereka melalui pendidikan non-formal dan program keaksaraan orang dewasa.
- Menjamin bahwa anak-anak memiliki cukup untuk makan dan untuk belajar mengembangkan kesehatan melalui penyediaan makanan sekolah.
- Mendorong seluruh pemerintah nasional untuk mengalokasikan anggaran pembangunan paling sedikit 20% dari anggaran nasional untuk pendidikan dan untuk menghapuskan biaya untuk mencegah terjadinya begitu banyak anak-anak dari pergi ke sekolah (*drop out*).

Berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan, menurut *Unesco (United Nation on Educational, Social, and Cultural Organization)*, pendidikan terdiri dari 4 (empat) pilar dengan menitikberatkan pada: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, (4) *learning to live together in peace and harmony*. Esensi keempat pilar tersebut adalah bahwa pendidikan mampu menguasai ilmu pendidikan dan teknologi, pendidikan itu pun mampu menerapkannya dalam kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat, bahwa pendidikan itu merupakan pengembangan diri setinggi dan seoptimal mungkin, dan bahwa pendidikan adalah untuk keberhasilan dalam lingkungan di dunia dengan adil, tenteram, dan sejahtera. Pendidikan yang memiliki *outcome* seperti ini adalah pendidikan yang memiliki kekuatan untuk membangun kualitas dan meningkatkan martabat kehidupan suatu bangsa.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen, pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 memberikan amanat sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. Maksud dari amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 agar pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah agar terwujud pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Banten.

Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dibutuhkan pembiayaan yang besar guna mencapai Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
2. Standar Isi (SI);
3. Standar Proses;
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Tendik);
5. Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras);
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan Pendidikan;
8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu;
2. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan sektor pendidikan, antara lain:

1. Penambahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK dan SKH Negeri yang tersebar di 8 kabupaten/ kota;
2. Penambahan bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA, SMK dan SKH Negeri yang tersebar di beberapa sekolah negeri dan swasta di 8 (delapan) kabupaten/ kota;

3. Mencukupi biaya operasional sekolah SMA, SMK dan SKH negeri;
4. Memberikan bantuan biaya operasional sekolah kepada SMA, SMK dan SKH Swasta;
5. Memberikan Tunjangan Kinerja Kepala sekolah, guru (PNS maupun honorer), dan tenaga kependidikan lainnya termasuk para pengawas sekolah.

Kebijakan pembangunan pendidikan Pemerintah Provinsi Banten ini diikuti dan diimbangi secara sinergis oleh 8 (delapan) pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten untuk jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama).

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2007:11), menyebutkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan objek penelitian melalui pengkajian secara mendalam dan apa adanya, sehingga diperoleh gambaran atau secara sistematis mengenai fakta-fakta, fenomena-fenomena dari objek yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) dan studi kepustakaan. Wawancara (interview) merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan substansi, masalah, ide, gagasan pemikiran kepada orang yang menjadi informan atau partisipan. Peneliti menentukan individu-individu sebagai informan. Informan penelitian ini meliputi: guru, widyaiswara, pejabat pemda, kepala sekolah, dosen perguruan tinggi, dan informan lain yang relevan dengan kebutuhan data. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah kepustakaan baik berupa buku referensi, dokumen, dan lainnya. Data penelitian diolah dari data berupa transkrip dan catatan lapangan menjadi data rapi dan siap ditafsirkan berdasarkan prosedur dan pentahapan yang sistematis. Data yang telah dikumpulkan baik berupa data telaah pustaka maupun data hasil wawancara diteliti kelengkapannya ditelaah, dicermati dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah, kurang dipahami atau masih meragukan. Tahapan selanjutnya adalah analisis data yaitu mengelompokkan, melakukan klasifikasi data sesuai substansi, yang bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk penyajian yang mudah dibaca dan dimengerti. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah informan mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan. Pemprov Banten perlu berkomitmen melaksanakan visi-misi sebagaimana Gubernur telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagai strategi untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. "Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas" menjadi misi ke-3 yang telah ditetapkan. Dalam RPJMD Telah ditetapkan tujuan pendidikan adalah terwujudnya akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.

Mengenai strategi pembangunan pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan beberapa tindakan dengan segera. Pertama, berkoordinasi dan membangun pemahaman serta komitmen bersama dengan pemerintah beberapa kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan ruang kelas yang rusak dalam jangka waktu tertentu. Kedua, memberikan bantuan keuangan yang setiap tahunnya telah menjadi kewajiban provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota namun, bantuan tersebut khusus diperuntukkan untuk perbaikan ruang kelas rusak dan bantuan keuangan lainnya seperti hibah. Ketiga, jika pendanaan tersebut masih juga kurang atau tidak dapat memenuhi target yang direncanakan, Pemerintah Provinsi Banten perlu melibatkan perusahaan dan menggali potensi dari dana tanggung jawab sosial perusahaan secara maksimal di Provinsi Banten dan mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan hal yang sama. Keempat, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan cepat, Pemerintah Provinsi Banten perlu membuat peraturan untuk dana hibah dan tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah, bukan oleh pihak ketiga dengan prosedur lelang untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kelima, peraturan yang dibuat juga harus memastikan bahwa program perbaikan ruang kelas rusak tersebut tepat sasaran dan sesuai prioritas serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

Agar pendidikan di Provinsi Banten semakin berkualitas maka, beberapa partisipan mengemukakan ide dan pendapat sebagai berikut:

- a. Menerapkan standar kualitas dan indikator yang sama pada setiap masing-masing jenjang pendidikan yang dilakukan dengan sistem monitoring dan evaluasi dengan mengklasterkan berdasarkan tingkatan capaian kualitas pendidikannya, sehingga dapat diketahui mana-mana sekolah yang sudah sesuai standar dan mana yang belum. Kemudian dikarenakan keterbatasan kewenangan maka hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat disampaikan usulan melalui kepala daerah untuk peningkatan standar kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah yang belum sesuai standar. Sehingga kesenjangan kualitas antar sekolah di kabupaten/kota menjadi setara dan dapat menghilangkan stigma masyarakat yaitu dengan bersekolah di swasta yang baik akan mendapatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan yang baik.
- b. Memperbanyak sekolah vokasi yang berbasis pada keterampilan, untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja sesuai dengan keterampilannya dan disiapkan untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Banten.
- c. Pemerataan tenaga pendidik yang mampu menjangkau wilayah-wilayah pedesaan di Provinsi Banten.

Penerapan standar kualitas dan indikator pendidikan yang sama yang dilakukan melalui sistem monitoring dan evaluasi dengan mengklasterisasi berdasarkan tingkatan capaian kualitas pendidikan, diyakini dapat menjadi strategi untuk mengatasi masalah pembangunan pendidikan di Banten. Melalui strategi ini akan diketahui mana-mana sekolah yang sudah sesuai standar dan mana yang belum dalam rangka mengurangi kesenjangan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Pendapat yang tidak kalah menarik, dikemukakan oleh informan yang selama ini mengabdikan sebagai Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Banten. Menurutnya agar pendidikan di Banten semakin berkualitas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

- Peningkatan anggaran pendidikan, termasuk untuk pembangunan gedung sekolah dan sarana-prasarananya.
- Peningkatan jumlah, mutu dan kesejahteraan guru.
- Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu.
- Pemerataan pembangunan pendidikan, fokus pada kabupaten tertinggal.
- Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan sarana umum penunjang pendidikan, seperti jalan, jembatan dan angkutan umum.
- Peningkatan koordinasi/kerjasama provinsi dan kabupaten/kota untuk menggenjot pendidikan.

Partisipan tersebut menambahkan, strategi pembangunan pendidikan yang efektif di Banten, harus fokus pada 3M (unsur manajemen) :

- Man (Segala hal terkait guru/dosen dan siswa).
- Money (anggaran pendidikan untuk semua kebutuhan pendidikan dan penunjangnya).
- Method (metode pembelajaran yang pas, termasuk pemerataan, *link and match* dengan dunia kerja).

Seorang kepala sekolah yang bertugas di sekolah dasar di Kabupaten Tangerang, mengemukakan sejumlah ide yang perlu dilakukan oleh Pemprov Banten. Menurutnya, seharusnya Pemprov Banten mengadakan pemetaan masalah sehingga dalam mengambil kebijakan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Hal ini tentunya harus memanggil orang-orang yang ahli di bidang pendidikan agar langkah yang di ambil nantinya tidak salah dalam mengambil kebijakan. Untuk itu, strategi yang perlu diambil agar pendidikan di Provinsi Banten berkualitas di antaranya:

- Mengadakan diklat-diklat/workshop berkesinambungan terhadap guru-guru.
- Melengkapi sarana dan prasarana di setiap level pendidikan.
- Penyebaran tenaga pendidik yang profesional di setiap jenjang secara merata.
- Kesejahteraan guru di tingkatkan.

Partisipan lain memberikan pendapat, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten, maka harus dilakukan usaha sekeras mungkin dengan melakukan pemberdayaan sumberdaya manusianya dalam rangka meningkatkan proses belajar-mengajar. Sudah saatnya pemerintah daerah fokus kepada peningkatan SDM yang pada gilirannya nanti akan memberikan output dan outcome yang baik. Jangan berikan peluang untuk SDM yang sudah baik kemudian zig zag ke struktural. SDM yang sudah baik tersebut sebenarnya sudah tepat di dunia pendidikan karena dibekali pelatihan-pelatihan yang mendukung kependidikan.

Jadi kembali lagi kepada komitmen daerah serius atau tidak untuk membangun pendidikan di daerahnya. Banyak kasus di daerah guru yang berprestasi melakukan zig zag menjadi

struktural bahkan sampai mencapai jabatan ASN nomer satu di daerahnya. Hal ini sangat merusak tatanan organisasi, boleh jadi memang yang bersangkutan berprestasi tetapi banyak pegawai lainnya berasumsi bahwa itu semua karena unsur kedekatan dengan orang nomer satu satu di daerahnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten setelah memperoleh status daerah otonom baru. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Terdapat sejumlah permasalahan krusial pembangunan pendidikan di Provinsi Banten, meliputi:
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari rendahnya kualitas gedung sekolah dan minimnya jumlah sarana pendidikan, seperti: gedung sekolah yang tidak memadai dari sisi jumlah, laboratorium, perpustakaan, serta sarana penunjang lainnya.
 - b. Pembangunan pendidikan terkesan tidak merata, pada wilayah perkotaan kualitas pendidikan sudah bagus namun pada wilayah kabupaten pembangunan pendidikan belum sepenuhnya bagus dari berbagai aspek seperti, kualitas dan ketercukupan sarana prasarana sekolah, kapasitas pendidik, keterjangkauan masyarakat untuk mengikuti pendidikan terkendala oleh jarak, tempat, biaya, dll.
 - c. Lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disebabkan oleh pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sekolah sekolah-sekolah khususnya pada level SMP, SD dan pendidikan usia dini yang saat ini sudah tidak ditangani lagi oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sesuai undang-undang pemerintahan daerah saat ini hanya mengurus sekolah menengah atas seperti SMA/K, MA dan lainnya yang setara.
2. Dari tahun ke tahun, beberapa indikator pembangunan pendidikan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, antara lain Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Namun peningkatan tersebut tidak masih belum mampu menutupi masih lemahnya pembangunan pendidikan di Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Banten memerlukan terobosan dan strategi baru dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di wilayah Provinsi Banten

Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan perlu menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan berbagai program dan kegiatan yang strategis antara lain melalui:
 - a. Dukungan fasilitasi berupa sarana dan prasana kepada daerah kabupaten/kota agar kabupaten/kota dapat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Gedung sekolah dan sarana penunjang lainnya merupakan elemen mendasar yang harus disiapkan untuk membangun pendidikan yang berkualitas.

- b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk menempuh pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui program-program unggulan misalnya, subsidi biaya pendidikan, pembangunan gedung dan sarana pendidikan yang berkualitas di seluruh Banten, membangun sekolah di pedesaan, peningkatan kapasitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan, dan memperbaiki sistem pendidikan di Provinsi Banten.
 - c. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten/kota yang ada untuk bersama-sama berkomitmen dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Banten melalui kerjasama dan kolaborasi strategis membangun gedung sekolah, penyiapan sarana prasarana sekolah dan mengembangkan kompetensi guru, dosen secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dengan memperhatikan capaian indikator pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) harus terus ditingkatkan melalui program dan kebijakan inovatif dan sinergis antara Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada.
 3. Terdapat tiga dimensi dalam strategi pembangunan pendidikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu:
 - a. Pembangunan infrastruktur pendidikan perlu terus ditingkatkan mulai dari gedung sekolah, memperbaiki gedung yang rusak dan membangun sekolah baru di wilayah-wilayah yang tertinggal pendidikannya dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
 - b. Meningkatkan kompetensi dan jumlah guru dan tenaga pengajar pada semua level pendidikan melalui program dan kebijakan pengembangan kompetensi dan rekrutmen guru serta tenaga pengajar yang terarah. Pemprov Banten dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, lembaga donor, komunitas masyarakat, dan stake holders lainnya.
 - c. Perlunya *political will* dari eksekutif dan legislative untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten melalui dukungan anggaran yang memadai dan memasukkan program dan kebijakan pembangunan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek-Menengah dan Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. BPS RI, Jakarta, 107 p.
- Mahardiki, D., & Santoso, R. P., 2013. Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia 2006–2001. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 6(2): 180-193.
- Sari, P.S., Anwar, D., & Darrussamin, 2016. Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. *I-Economic* 2(1): 86-101.

Sebayang, A. F., 2006. Pencapaian IPM Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan Antara Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 22(4): 411-427.

Yektiningsih, E. 2018. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Sosioagribis*, 18(2): 32-50.

Gumelar Ardiansyah; Posted on January 25, 2020 Indikator Pembangunan Ekonomi.

Apriyanti Widiansyah; Posted Vol 17, No 2 (2017) > WIDIANSYAH; Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi; Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

Mahroji, D. 2019. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1): 51-72.

Standar Nasional Pendidikan; Powered by - Designed with the Human theme; Kumpulan Artikel tentang Ilmu komputer, Internet dan juga pelajaran sekolah dan artikel lainnya. Menurut Para Ahli. Label: Budaya, Pendidikan, Penelitian, Pengertian, Pengetahuan;

Rohadi, Amin. 2020. Catatan Pembangunan Pendidikan Di Banten <https://satubanten.com/catatan-pembangunanan-pendidikan-di-banten>.